

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa sehingga atas berkenaan-Nya maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giripurwo periode Tahun 2021 -2027 telah berhasil disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.

Penyusunan dokumen perencanaan ini dapat diselesaikan berkat dukungan penuh dari segenap tim Penyusunan RPJMKal, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Tokoh Masyarakat, serta Warga Masyarakat yang berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan di masing-masing wilayah untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari.

Melalui hasil kerja keras, kami bersama-sama masyarakat menyusun Perencanaan Pembangunan yang ada di Kalurahan kami, dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat Kalurahan, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Kalurahan, lembaga setingkat Kalurahan, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat digunakan dan bahkan di rencanakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada:

- (1) Segenap anggota Tim Penyusun RPJMKal Giripurwo;
- (2) Para Tokoh Masyarakat yang telah memberi masukan berupa sumbang saran maupun nasehat-nasehat yang sangat berguna;
- (3) Fasilitator Kapanewon, Pendamping Lokal, dan para

pelatih yang telah memberikan pembekalan/pelatihan kepada Tim Penyusun RPJMKal;

(4) Segenap anggota / warga masyarakat

Atas partisipasi dalam kegiatan pengkajian keadaan Kalurahan sehingga bahan-bahan untuk penyusunan RPJMKal ini dapat terkumpul.

Kami menyadari bahwa dokumen RPJMKal ini masih membutuhkan penyempurnaan lagi dikemudian hari sebagai bahan perencanaan pembangunan Kalurahan. Untuk itu, penyempurnaan dokumen ini masih memungkinkan dilakukan pada saat diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang dilaksanakan setiap tahun. Demikian, semoga dengan adanya RPJMKal ini kegiatan pembangunan Kalurahan dapat lebih terarah dan berjalan dengan lancar.

Tim Penyusun

RPJM Kalurahan Giripurwo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Hubungan Antar Dokumen.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA.....	11
2.1 Kondisi Kelurahan.....	11
2.1.1 Sejarah Desa.....	11
2.1.2 Demografi.....	12
2.1.3 Keadaan Sosial.....	15
2.1.4 Keadaan Ekonomi.....	19
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa.....	20
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa.....	20
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	21
BAB III POTENSI DAN MASALAH.....	28
3.1 Potensi.....	28
3.2 Masalah.....	30
BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM DESA.....	33
4.1 Visi dan Misi.....	33
4.1.1 Visi.....	33
4.1.2 Misi.....	35
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	38
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA.....	42
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	50
BAB VII KEBIJAKAN UMUM.....	53
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	59
BAB IX PENUTUP.....	62

LAMPIRAN :

1. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Dari Pedukuhan;
2. Daftar Gagasan Pedukuhan;
3. Sketsa Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
4. Kalender Musim Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
5. Bagan Kelembagaan Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
6. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
7. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musdes;
8. Rancangan RPJM Desa;
9. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa; dan
10. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musrenbangdes.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun Pembangunan Desa adalah berbagai upaya yang diusahakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa menjadi sangat penting bagi pondasi pembangunan nasional, mengingat Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas wilayah pedesaan. Dalam rangka tersebut, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya diperlukan adanya perencanaan pembangunan desa yang mendasar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki berdasarkan kewenangan dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten.

Menurut undang - undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam pasal 77 bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa sendiri meliputi 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan desa menjadi penting mengingat Desa harus mampu mengatur dan mengurus desanya sendiri berdasarkan kewenangan sebagai desa. Dengan adanya perencanaan pembangunan, akan dapat mengoptimalkan sumber - sumber kekayaan desa sebagai kekuatan utama membangun desa. Sehingga akan muncul inovasi - inovasi yang terumus dalam dokumen perencanaan desa. Hak - hak warga desa menjadi menjadi lebih terjamin karena semua pembangunan desa berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada di desa tersebut.

Sesuai dengan pasal 30 undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Perencanaan Pembangunan Desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa.

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa, sesuai

ketentuan pasal Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Perencanaan Pembangunan Desa Disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun

RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana enam (6) tahunan yang memuat Visi dan Misi Lurah terpilih yang dituangkan menjadi visi misi desa, sehingga warga/masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan kebijakan umum desa. Sementara itu RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dibedakan menjadi 2 jenis kegiatan perencanaan, yaitu : 1) Kegiatan yang kan didanai oleh APBDes terutama berdasarkan kewenangan lokal dan, 2) kegiatan yang tidak mampu dibiayai melalui APBDes dan bukan merupakan kewenangan local skala desa seperti kegiatan yang mencakup Kawasan perdesaan yang perlu disulunkan melalui mekanisme MUSrenbang Kecamatan hingga Kabupaten dengan sebutan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP)

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJM ini adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan Pembangunan Desa agar teratur dan terarah menuju kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RPJM ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam Menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat giripurwo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat
- c. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap program pembangunan
- d. Memelihara dan mengembangkan hasil - hasil pembangunan
- e. Mendorong dan menumbuhkembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan
- f. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan Lembaga supradesa

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Kalurahan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
8. Peraturan Menteri Kalurahan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa diperlukan dasar /pedoman arah yang akan dicapai sehingga kebijakan yang akan ditetapkan dapat terarah dengan baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) memuat Visi dan Misi yang ditetapkan sebagai landasan dan penyusunan/penetapan keputusan para pemangku kepentingan yang ada di desa, sehingga program yang dilaksanakan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, seiring berjalannya waktu dan tuntutan perkembangan yang ada mengharuskan dilaksanakan Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, agar nantinya pelaksanaan kegiatan yang ada tetap dalam berjalan dan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.

Dengan Perubahan atas RPJM Desa maka diharapkan lebih meningkatkan kinerja pemerintah Desa, adapun disusunnya Perubahan RPJM Desa bermanfaat antara lain :

- Lebih terjaminnya pelaksanaan pembangunan di desa
- Sebagai rencana induk pembangunan di desa
- Memberi arah pembangunan desa
- Sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi dan partisipasi masyarakat dengan keterpaduan dan pemerintah.
- Mendorong masyarakat untuk swadaya dalam membangun desa.

Sasaran penyusunan Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | RPJM Desa | adalah memantapkan peran pemerintah, masyarakat dan semua stikholder/pemangku kepentingan yang ada di desa, dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa.

Dengan berdasar pada pertimbangan tersebut hasil dari kegiatan pembangunan desa akan mencapai sasaran dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat lahir dan batin karena dilaksanakan secara partisipatif.

Kedudukan Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | RPJM Desa | adalah sebagai dokumen dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, karena dalam melaksanakan rencana kegiatan desa harus berdasar pada acuan dan pedoman untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, Dalam perjalanannya apabila dalam Dokumen RPJM Desa terdapat hal-hal yang belum termuat atau bertentangan dengan kebijakan dan aturan yang ada, maka tidak menutup kemungkinan untuk dievaluasi akibat adanya kejadian yang diluar rencana.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibuat sistematika sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sesuai dengan aturan yang tersebut maka sistematika dalam penyusunan Perubahan atas RPJM Des adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisikan antara lain:

- a. Penjelasan mengenai pengertian RPJM Desa
- b. Penjelasan mengenai proses penyusunan RPJM Desa
- c. Penjelasan mengenai mengapa perlunya disusun RPJM Desa
- d. Penjelasan mengenai kedudukan RPJM Desa
- e. Penjelasan mengenai keterkaitan antara dokumen RPJM Desa dengan dokumen RKP Desa dan DU RKP Desa

1.2 Maksud dan Tujuan

Berisikan:

Penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa

1.3 Dasar Hukum

Berisikan:

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan/dasar hukum tentang RPJM Desa, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Peraturan Desa yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJM Desa.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Berisikan:

Penjelasan mengenai hubungan RPJM Desa dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya, antara lain hubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Provinsi/Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi/ Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Berisikan :

Penjelasan mengenai organisasi penyusunan dokumen RPJM Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Berisikan:

Penjelasan mengenai sejarah desa mulai dari awal berdirinya desa sampai dengan kondisi saat penyusunan RPJM Desa ini, dalam sejarah desa menggambarkan tokoh/pelaku-pelaku pemimpin desa ini, kejadian/peristiwa yang bersejarah serta prestasi yang pernah diraih.

2.1.2 Demografi

Berisikan :

Data-data kependudukan antara lain :

a. Jumlah Penduduk

- 1) Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
- 2) Jumlah Penduduk menurut Mata Pencarian
- 3) Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama

b. Jumlah Keluarga

- 1) Jumlah Penduduk dilihat dari Hubunagn

Antar Keluarga

2.1.3 Keadaan Sosial

Berisikan gambaran keadaan sosial masyarakat antara lain:

a. Agama

Jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis agama

b. Kesehatan Masyarakat

- 1) Kualitas Bayi, Ibu hamil dan Persalinan
- 2) Perilaku hidup bersih

c. Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

- 1) Konflik yang terjadi
- 2) Pelembagaan sistem keamanan lingkungan

d. Kedaulatan Politik Masyarakat

- 1) Peranserta masyarakat dalam pembangunan
- 2) Adat istiadat.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Berisikan gambaran kondisi perekonomian masyarakat, antara lain :

a. Pengangguran

b. Kesejahteraan Keluarga

c. Pendapatan perkapita dan PDDB Desa

d. Penguasaan aset ekonomi masyarakat

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Berisikan pembagian wilayah Desa berdasarkan pedukuhan, RW dan RT

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berisikan antara lain bagan struktur organisasi Pemerintah Desa, jumlah dan nama aparat pemerintahan desa berdasarkan pendidikan, jumlah dan nama anggota kelembagaan desa

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Berisikan gambaran potensi secara umum yang dimiliki oleh desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa, adapun

potensi yang harus dijelaskan adalah : Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan dan Sumber Daya Sosial Budaya

3.2 Masalah

Berisikan permasalahan yang dihadapi oleh desa berdasarkan pengkajian keadaan desa menurut bidang atau urusan pemerintahan desa.

BAB IV : KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Berisikan:

- a. penjelasan mengenai visi Kepala Desa, jangka waktu sesuai masa jabatan dan penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.
- b. penjelasan keterkaitan antara Visi Kepala Desa dengan Visi Pemerintah Daerah

4.1.2 Misi

Berisikan:

- a. uraian maksud perumusan Misi. Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami
- b. penjelasan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Berisikan:

Penjelasan hal-hal yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam rangka untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Desa dan permasalahan pembangunan Desa

4.2.2 Sasaran

Berisikan :

Penjelasan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Berisikan:

- a. penjelasan mengenai langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
- b. penjelasan rumusan strategi cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipertegas dalam arah kebijakan

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berisikan :

Kebijakan dibidang keuangan desa yang meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, dan kebijakan pembiayaan desa

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

Berisikan:

- a. penjelasan arah kebijakan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan, yang menjadi landasan program pembangunan pemerintahan desa.
- b. penjelasan hubungan antara kebijakan pembangunan desa dengan kebijakan daerah

BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Berisikan :

Gambaran program/kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian kebijakan pemerintah daerah serta program pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan desa, meliputi program/ kegiatan pada bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat

BAB IX : PENUTUP

Berisikan:

- a. rumusan yang menjadi kunci pokok terlaksananya kegiatan pembangunan desa.
- b. memberikan pemecahan permasalahan pada masa peralihan atau transisi agar tidak terjadi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Desa.

- c. Memberikan gambaran peranan pemangku kepentingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

LAMPIRAN :

1. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Dari Pedukuhan;
2. Daftar Gagasan Pedukuhan;
3. Sketsa Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
4. Kalender Musim Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
5. Bagan Kelembagaan Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
6. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
7. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musdes;
8. Rancangan RPJM Desa;
9. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa; dan
10. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musrenbangdes.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1 Kondisi Kalurahan

Setiap Kalurahan memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri, sejarah tersebut merupakan pencerminan atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau di wilayah Kalurahan, baik yang tertulis dalam naskah dokumen resmi maupun dalam bentuk dongeng atau cerita yang disampaikan oleh para leluhur yang turun-temurun disampaikan pada generasi penerus yang secara fakta dapat dipergunakan sebagai pedoman sejarah terbentuknya Kalurahan.

2.1.1 Sejarah Kalurahan Giripurwo

Asal Usul Nama Kalurahan Giripurwo

Kalurahan Giripurwo adalah salah satu Kalurahan di wilayah Kecamatan Girimulyo yang terletak di kawasan perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 tahun 1946 Kalurahan Giripurwo terdiri dari gabungan tiga kalurahan, yaitu kalurahan Niten, Kalurahan Kepundung dan kalurahan Wadas.

Penggabungan dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sebagaimana penegasan pasal 7 ayat 2 maklumat DIY no 16 tahun 1946 yang berbunyi : "Jika ternyata ada kalurahan yang tidak memenuhi kebutuhannya sendiri maka harus digabungkan dengan kalurahan lain". Gabungan 3 (tiga) kalurahan tersebut menjadi kalurahan Giripurwo yang meliputi 15 pedukuhan. Lurah yang menjabat saat penggabungan adalah :

1. Kelurahan Niten dengan lurah Honggo Pangrekso
2. Kelurahan Wadas dengan lurah R. Dipo Kawoco
3. Kelurahan Kepundung dengan lurah Noto Pawiro

Sejak penggabungan 3 (tiga) kalurahan tersebut berdasarkan maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta atau Peraturan Daerah Kulon Progo

Kepala Kalurahan sebagai berikut :

1. Honggo Fangrekso : tahun 1949 – 1976
2. R. Suprpto : tahun 1976 – 1995
3. Russumaji Sigit Pramana (Pj. Kepala Kalurahan) : tahun 1995 - 1996
4. R. Trisna Rahardja : tahun 1996 – 2004
5. Supiyanta (Pj Lurah) : tahun 2004 – 2005
6. Trisna Raharja : tahun 2005 - 2008
7. Mardi Santosa : tahun 2008 – 2014
8. Supiyanta (Pj. Kepala Kalurahan) : tahun 2014 – 2015
9. Mardi Santosa : tahun 2015 - 2021

2.1.2 Demografi

a. Jumlah penduduk

Saat ini jumlah penduduk di Kalurahan Giripurwo sejumlah 6925 jiwa yang tersebar di 15 Padukuhan. Dengan jumlag penduduk laki - laki 3427 dari perempuan sebanyak 3498. Dari jumlah penduduk tersebut terbagi dalam karegori sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	<1	81	51	132
2	2-4	121	104	225
3	4-9	233	233	466
4	10-14	234	220	454
5	15-19	202	211	413
6	20-24	236	218	454
7	25-30	255	244	499
8	30-34	210	222	432
9	35-39	247	226	473
10	40-44	268	223	491
11	45-49	224	232	456
12	50-54	219	214	433
13	55-59	190	228	418
14	60-64	215	252	467
15	65-69	181	189	370
16	70-74	110	163	273

17	75+	201	268	469
JUMLAH		3.427	3.498	6.925

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	476	413	889
2	Mengurus Rumah Tangga	0	453	453
3	Pelajar/Mahasiswa	538	541	1.079
4	Pensiunan	77	31	108
5	Pegawai Negeri Sipil	43	18	61
6	Tentara Nasional Indonesia	5	0	5
7	Kepolisian Ri	8	1	9
8	Perdagangan	1	4	5
9	Petani/Pelabun	1.090	1.322	2.412
10	Peternak	1	1	2
11	Industri	1	0	1
12	Karyawan Swasta	768	497	1.265
13	Karyawan BUMN	3	3	6
14	Karyawan BUMD	2	1	3
15	Karyawan Honorer	8	6	14
16	Buruh Harian Lepas	123	6	129
17	Buruh Tani/Perkebunan	7	3	10
18	Pembantu Rumah Tangga	0	2	2
19	Tukang Batu	7	0	7
20	Tukang Kayu	2	0	2
21	Tukang Jahit	2	0	2
22	Penata Rambut	0	1	1
23	Seniman	0	1	1
24	Anggota DPRD Provinsi	1	0	1
25	Dosen	2	1	3
26	Guru	18	37	55
27	Bidan	0	3	3
28	Perawat	4	4	8
29	Sopir	1	0	1

30	Pedagang	19	29	48
31	Perangkat Desa	23	3	26
32	Kepala Desa	1	0	1
33	Wiraswasta	196	117	313
JUMLAH		3.427	3.498	6.925

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Tidak Sekolah	432	456	888
2	Belum Tamat SD	315	312	627
3	Tamat SD	909	1.122	2.031
4	Tamat SMP	611	559	1.17
5	Tamat SMA	1.03	868	1.898
6	Diploma I/II	11	13	24
7	Diploma III	30	42	72
8	Srta I	83	121	204
9	Srta II	5	5	10
10	Srta III	1	0	1
JUMLAH		3.427	3.498	6.925

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3.342	3.403	6.745
2	Kristen	12	18	30
3	Katholik	73	76	149
4	Kepercayaan	0	1	1
JUMLAH		3.427	3.498	6.925

b. Jumlah Keluarga

Tabel 5

Jumlah Keluarga dan Hubungan antar Keluarga

No	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Keluarga	2.033	376	2.409
2	Suami	2	0	2
3	Istri	0	1.833	1.833
4	Anak	1.268	1.037	2.305

5	Menantu	0	1	1
6	Cucu	60	33	93
7	Orang Tua	22	106	128
8	Mertua	5	44	49
9	Family Lain	33	66	99
10	Lainya	4	2	6
JUMLAH		3.427	3.498	6.925

2.1.3 Keadaan Sosial

a. Agama

Agama Islam adalah agama Mayoritas yang dipeguk oleh Masyarakat Giripurwo. Selain itu ada juga pemuk agama Kristen, Katholik dan penganut kepercayaan. Pemeluk agama Islam tersebar di seluruh Padukuhan di Kalurahan Giripurwo. Agama Kristen dan Katholik tersebar di Padukuhan Karanganyar, Nglengkong, Grigak, Sabrang, Wadas, Banjaran, dan Pringapus. Selain padukuhan tersebut 100% masyarakatnya memeluk Agama Islam. Lebih lengkap data pemeluk agama di Kalurahan Giripurwo adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Jumlah Pemeluk Agama masing – masing Padukuhan di Kalurahan Giripurwo

No	Padukuhan	Islam	Kris- ten	Kath- olik	Hin- du	Bud- dha	Kong- hucu	Keper- cayaan	Total
1	KARANGANYAR	355	-	7	-	-	-	-	362
2	NGLENGKONG	551	5	25	-	-	-	-	581
3	GRIGAK	438	10	65	-	-	-	-	513
4	SABRANG	442	1	21	-	-	-	-	464
5	KEBONROMO	827	-	-	-	-	-	1	828
6	WADAS	364	-	4	-	-	-	-	368
7	BANJARAN	421	8	3	-	-	-	-	432
8	NGESONG	521	2	-	-	-	-	-	523
9	PENGUNGUNG	400	-	-	-	-	-	-	400
10	PRINGAPUS				-			-	

		274	-	18	-	-	-	292
11	SIDI	204	-	-	-	-	-	204
12	KEPUNDUNG	366	-	2	-	-	-	368
13	TOMPAK	306	-	-	-	-	-	306
14	BULU	664	-	5	-	-	-	669
15	SEKARO	646	1	-	-	-	-	647
	TOTAL	6.779	27	150	-	-	-	1 6.925

b. Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pencapaian pembangunan kesehatan dapat digambarkan melalui kualitas bayi, ibu hamil dan persalinan dan perilaku hidup bersih.

1) Kualitas Bayi, Ibu hamil dan Persalinan

Status gizi masyarakat merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang menggambarkan keadaan masyarakat. Kualitas Bayi, Ibu hamil dan Persalinan menjadi prioritas utama dalam penanganan kesehatan masyarakat, sehingga dengan adanya balita di Kalurahan Purwosari yang dikategorikan kurus menuju keadaan stunting dalam Kartu Menuju Sehat dapat menggambarkan tingkat kesehatan masih perlu mendapat perhatian secara khusus.

2) Perilaku hidup bersih

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seluruh tatanan rumah tangga telah menunjukkan berperilaku bersih dan sehat secara baik. Hampir Semua keluarga di Kalurahan Purwosari telah memiliki kamar mandi dan WC meskipun masih tergolong sederhana dan belum semuanya memiliki saluran pembuangan air limbah yang permanen. Masyarakat Kalurahan Purwosari menggunakan sumber air minum dari mata air, PAMSIMAS, dan sumur. Penerangan rumah tangga dengan menggunakan listrik dari PLN dan memasak menggunakan kompor gas dan

sebagian masih menggunakan kayu bakar. Pada umumnya setiap keluarga sudah memiliki jamban keluarga dan sistem pembuangan air limbah sendiri. Namun dalam hal pembuangan sampah dan penuntasan air dipekarangan belum bisa berjalan secara optimal.

Tabel 7

Sarana Prasarana Bidang Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Puskemas	1	
2	Poskesdes	1	
3	Posyandu	15	Terdapat di masing - masing Padukuhan

Tabel 8

Tenaga Bidang Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Dokter	-	
2	Bidan Desa	3	
3	Perawat	6	
4	Kader Kesehatan	15	

c. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1) Konflik yang terjadi

Masyarakat Kalurahan Giripurwo adalah masyarakat Pedesaan yang masih mengedepankan rasa social dan kekeluargaan. Sampai saat ini belum ada konflik yang terjadi di masyarakat. Musyawarah selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap masalah sehingga tidak berujung ke konflik di masyarakat.

2) Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan

Sistem keamanan yang ada di Kalurahan Giripurwo terdiri dari kelembagaan-kelembagaan keamanan di padukuhan didukung dengan adanya pos kamling walaupun belum maksimal dalam kegiatannya. Pembinaan keamanan di Kalurahan Giripurwo dilakukan secara nyata untuk peningkatan sumber daya manusia maupun informasi -

informasi tentang terjadinya konflik masa kini dan cara penanggulangannya.

Tabel 9

Pelembagaan sistem keamanan lingkungan

Jumlah Siskamling/ Pos Ronda	144 RT
Jumlah Anggota Hansip dan Linmas	48 orang
Jumlah Pos Jaga Induk Desa	15 POS

d. Kedaulatan Politik Masyarakat

1) Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Keberadaan masyarakat yang sangat erat dengan budaya yang ada terutama adat istiadat yang masih kental dengan kegiatan gotong royong yang masih melekat kuat sehingga kehidupan masyarakatnya masih sangat membutuhkan satu dengan dengan yang lain. Di bidang pembangunan masyarakat saat ini diupayakan menggerakkan kehidupan bermasyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang masih melekat kuat di kehidupan bermasyarakat. Sehingga peran tokoh masyarakat, tokoh agama masih diperlukan didalam kegiatan pembangunan. Beberapa kegiatan sosial yang masih hidup dan berkembang serta dilaksanakan masyarakat, antara lain :

- Gotong royong membangun rumah
- Gotong royong memperbaiki rumah
- Gotong royong menggarap lahan pertanian
- Gotong royong membangun, memperbaiki dan merawat jalan dan sarana prasarana umum

2) Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan budaya leluhur yang harus dijaga kelestariannya, maka mengembangkan Seni dan budaya yang ada sampai saat ini tetap dijaga ke eksisannya, hal tersebut dapat membawa pengaruh positif baik dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya itu sendiri maupun bagi masyarakat pendukungnya secara sosial

budaya dan ekonomi yang nantinya dapat menuju Kalurahan Mandiri Budaya.

Sebagai masyarakat Jawa, masyarakat Purwosari masih memegang adat-istiadat yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Jawa pada umumnya, hal ini dapat terlihat dalam kegiatan :

- a. Hajatan pernikahan dengan adanya "Kondangan"
- b. Bersih Desa
- c. Kenduri
- d. Upacara adat lainnya.

Giripurwo adalah kalurahan yang terletak di lereng perbukitan menora. Dengan iklim yang relative dingin

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Perekonomian Kalurahan giripurwo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih sangat tradisional (pengolahan lahan pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Produk pertanian di Kalurahan Giripurwo dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu : a) Kehutanan dan Perkebunan meliputi Kebun Kakao, Cengkih, Panili, Empon-empon dan lain-lain, b) Peternakan , penduduk Kalurahan Giripurwo rata-rata berternak kambing dan beternak sapi dengan kepemilikan rata-rata 3 ekor/Kk, c) tanaman pangan meliputi padi dan komoditi buah-buahan lainnya, d) Perikanan di wilayah yang mencukupi airnya rata-rata masyarakat membudidayakan ikan antara lain : lele, nila, gurami, bawal, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat, sangat diperlukan usaha diantaranya diadakan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti PKK, kelompok tani, karang taruna, lembaga-lembaga keswadayaan lainnya.

Di samping peningkatan pengetahuan dan ketrampilan seperti dimaksud, maka kebiasaan yang kita temui di tengah masyarakat adalah terbatasnya modal. Untuk itu dirasa sangat perlu adanya lembaga Kalurahan yang khusus mencukupi

permodalan serta melaksanakan pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang ada.

Dalam masa-masa ini pengembangan sektor pariwisata menjadi sebuah harapan besar bagi peningkatan ekonomi berbasis komunitas/masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal dan alam yang ada di Giripurwo.

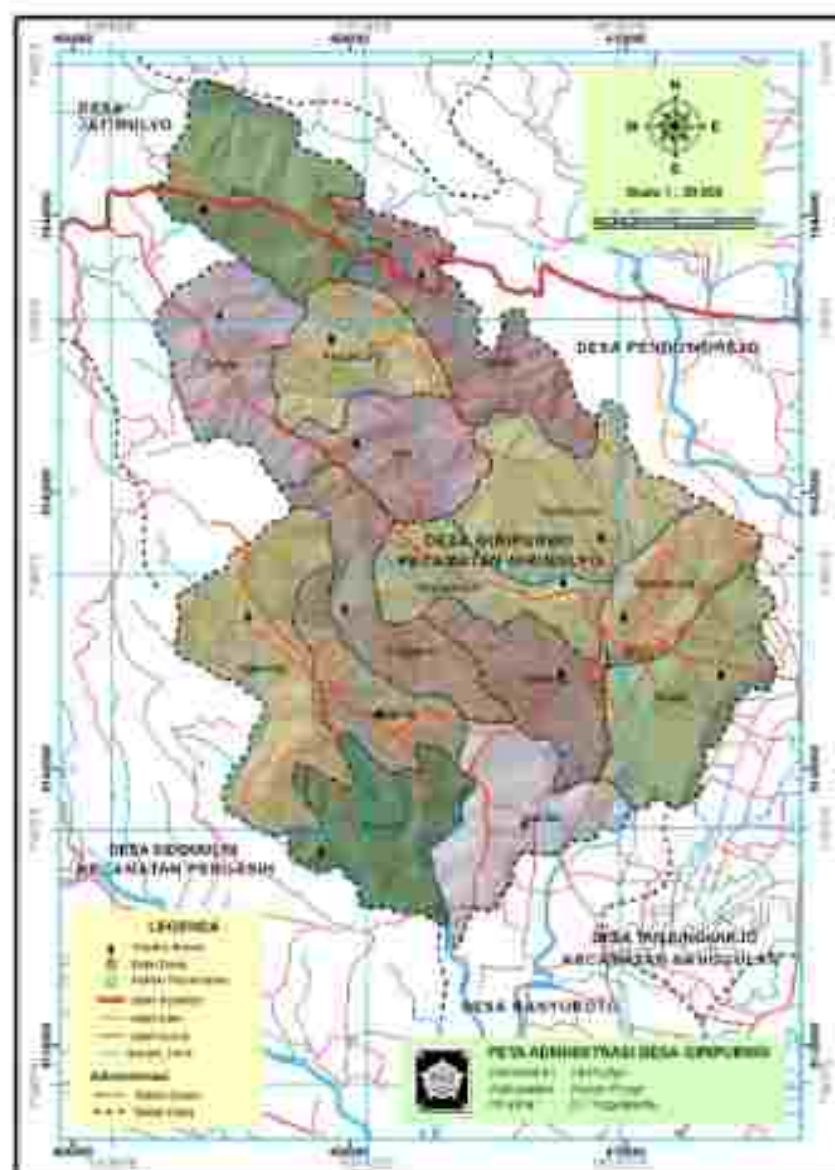
1.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

1.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Giripurwo merupakan salah satu dari 4 Kalurahan yang ada di Kapanewon Girimulyo. Kalurahan Giripurwo secara geografis terletak di ketinggian 400-500 dpl, curah hujan rata-rata pertahun 2.000 mm, keadaan suhu rata-rata 23 - 33°C, dengan berbatasan wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kalurahan Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo
- Barat : Kalurahan Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo
- Selatan : Kalurahan Banyuroto, Kecamatan Nanggulan
- Timur : Kalurahan Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan

Kalurahan Giripurwo merupakan ibu kota kecamatan girimulyo memiliki luas 1467,4305 Ha yang terbagi menjadi 15 Pedukuhan, yakni : Padukuhan Karanganyar, Padukuhan Nglengkong, Padukuhan Grigak, padukuhan Sabrang, Padukuhan Kebonromo, Padukuhan Wadas, padukuhan Banjaran, Padukuhan Ngesong, Padukuhan Penggung, Padukuhan Pringapus, Padukuhan Sidi, Padukuhan kepundung, Padukuhan Tompak, Padukuhan Bulu, dan Padukuhan Sekaro dan terdiri dari 44 Rukun warga (RW) dan 115 Rukun Tetangga (RT). Berikut peta wilayah Kalurahan Giripurwo



1.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi dan Pemerintah Kalurahan Giripurwo terdiri dari

- a. Lurah
- b. Pamong Kalurahan, yang terdiri dari
 1. Sekretariat Kalurahan, yang dipimpin oleh carik dan dibantu oleh :
 - a) Tata Laksana sarta Pangripta yang merupakan sebutan lain dari Urusan Umum dan Perencanaan , dipimpin oleh Panata Laksana sarta Pangripta
 - b) Danarta yang merupakan Sebutan dari Urusan Keuangan, dipimpin oleh Danarta
 2. Pelaksana Teknis

- a) Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya
 - b) Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin Ulu – ulu
 - c) Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa
3. Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu lurah sebagai satuan tugas kewilayahan yaitu Padukuhan yang dipimpin Dukuh

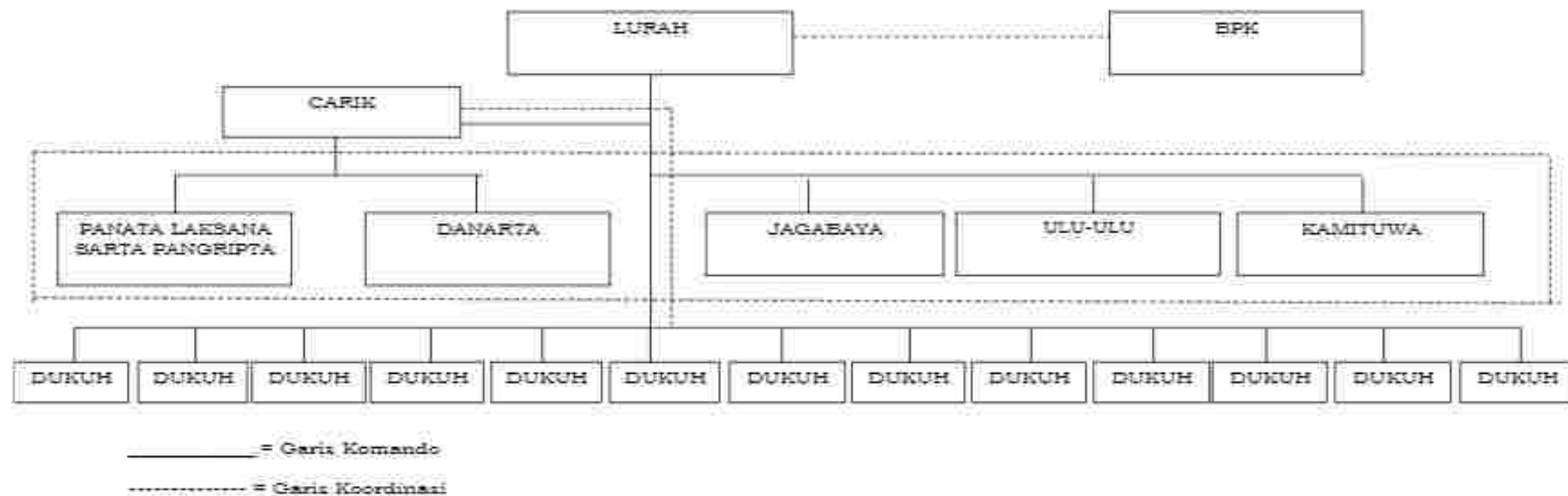
Saat ini Kalurahan Giripurwo dipimpin oleh Mardi Santosa, sebagai Lurah terpilih Tahun 2021 – 2027. Secara lengkap jumlah dan nama pamong adalah sebagai berikut

Tabel 10
Lurah dan Pamong Kalurahan Giripurwo

Jabatan	:	Nama	SK pengangkatan
Lurah	:	MARDI SANTOSA	384/A/2015
Carik	:	BINTI SACHURI, S.SOS	31 Tahun 2016
Jagabaya	:	TRIONO	61/KPTS/1994
Kamituwo	:	PUJIYONO, S.Ag	27 Tahun 2016
Ulu-ulu	:	SULISTYO	32/KPTS/1990
Danarta	:	WAHYU BASUKI	31/KPTS/1990
Panata Laksana Sarta Pangripta	:	PARJANA	21/KPTS/2002
Dukuh Karanganyar	:	SURADI	16/KPTS/2002
Dukuh Nglengkong	:	AGUS SUKRISTYO SAYEKTI, S.H.	02 tahun 2016
Dukuh Grigak	:	R. SUBIYASIH TRIYANTO	22/KPTS/2012
Dukuh Sabrang	:	PRIYANA	17/KPTS/2002
Dukuh Kebonromo	:	NYANA	11/KPTS/1989
Dukuh Wadas	:	R. JAROT ASIH BAGYA	27/KPTS/1990
Dukuh Banjaran	:	SUPARLAN	18/KPTS/2002
Dukuh Ngesong	:	SURANDI	39 Tahun 2020
Dukuh Penggung	:	PALJAN	19/KPTS/2002

Dukuh Pringapus	: WIWIT MULYANI, S.Pd	01/KPTS/1979
Dukuh Sidi	: JAROT EKA SANTOSA	12/KPTS/2012
Dukuh Kepundung	: WIJI SARJONO	28/KPTS/1990
Dukuh Tempak	: KARJIMAN	11/KPTS/1987
Dukuh Bulu	: SUNARTO	40 Tahun 2019
Dukuh Sekaro	: SUKIRJO	20/KPTS/2002
Staf	: SUPRIYO	33 Tahun 2016
Staf	: SURAHMI	41 Tahun 2019
Staf	: SEDA	28 Tahun 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN**



Dalam menjalankan pemerintahan Kelurahan, Lurah dibantu Oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Kelurahan. Adapun BPK Giripurwo dan beberapa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai berikut:

1) Badan Permusyawaratan Kelurahan

Badan Permusyawaratan Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis. BPK Giripurwo adalah BPK masa Bakti 2020 – 2025. Adapun kepengurusan BPK Giripurwo adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Daftar Nama Anggota BPK Giripurwo

No.	N a m a	SK Pengangkatan dan tanggal	Jabatan
1.	Mugi Wahono	129/A/2020	Ketua
2	Kristi Yuli Ani	129/A/2020	Wakil Ketua
3	Anif Prasetya Sujono, S.Th.I	129/A/2020	Sekretaris
4.	R. Suwito Nugroho	129/A/2020	Anggota
5	Murweni	129/A/2020	Anggota
6	Naryoto	129/A/2020	Anggota
7	Slamet Riyadi	129/A/2020	Anggota
8	Rustini	129/A/2020	Anggota
9	Suwartini	129/A/2020	Anggota

2) LPMKal

LPMKal merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Saat ini LPMK yang ada di Kalurahan giripurwo adalah LPMK Masa bakti 2020 - 2025, diketuai oleh Sugiya, S.Pd.SD

3) PKK

PKK merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui Gerakan PKK. Saat ini adalah PKK masa bakti 2021 - 2021, diketuai oleh Ibu Sestyo Samisiasih

4) Karang Taruna

Karang Taruna merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Adapun nama Karang Taruna Giripurwo adalah "Mahatma Satya Giri" yang diketuai oleh sdr. Wreda Wardana

5) Linmas

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;

Saat ini anggota Linmas Kalurahan Giripurwo sejumlah 45 orang
Pelatihan Linmas dilakukan 2 kali dalam 1 tahun

6) FPRB

7) RT

RT merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Di Kalurahan Giripurwo terdapat 115 RT

8) RW

RW merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT. Di Kalurahan Giripurwo ada 44 RW

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Masing-masing Padukuhan di Kalurahan Giripurwo memiliki potensi yang tidak sama antara Padukuhan yang satu dengan yang lain. Secara umum Potensi yang menonjol di Kalurahan Giripurwo adalah Pertanian. Baik pertanian sawah maupun perkebunan. Ada banyak kelompok masyarakat di kalurahan Giripurwo yang berhasil mengolah lahan menjadi lahan pertanian yang subur. KWT - KWT yang ada di masing - masing Padukuhan selama ini sudah membuktikan betapa potensi pertanian di Giripurwo sungguh besar. Mereka mengolah Lahan yang dulunya tandus menjadi subur dan menghasilkan komoditi pertanian yang lumayan banyak untuk memenuhi kebutuhan BPNT yang sudah berlangsung selama 1 tahun.

Selain pertanian, juga ada perikanan. Sektor perikanan banyak dijalankan di Padukuhan Sabrang, Penggung, Pringapus, dan Nglengkong, serta sedikit di Padukuhan Grigak. Memelihara ikan lele, bawal, nila, gurameh, patin dilakukan oleh beberapa rumah tangga di padukuhan - padukuhan tersebut. Beberapa menjadi suplyer lele pada BPNT. Sebagian masih untuk konsumsi sendiri.

Tidak ketinggalan, potensi wisata Giripurwo yang terdapat di beberapa Padukuhan, anatar lain : Karangnyar, Kebonromo, Ngesong, Banjaran, Tompak, Bulu dan Sekaro. Padukuhan - padukuhan tersebut

mempunyai landscape yang mempesona yang layak untuk "dipariwisatakan". Karangnyar memiliki Gunung Suru, perbukitan yang cukup tinggi dengan View Kota Yogyakarta. Begitupula Padukuhan Tompak dengan "Tompak View" nya yang memukau dikala malam tiba. Tidak ketinggalan dengan Waduk Mini Kleco yang ada di Padukuhan Ngesong. Kebun Durian yang ada di sekitar Waduk Mini Kleco adalah Potensi dan Daya Tarik yang luar biasa. Untuk wisata Budaya Giripurwo memiliki "Watu Wayang" yang ada di Padukuhan Kebonromo.

Padukuhan Bulu dan Sekaro juga memiliki spot yang cukup indah dan layak untuk dikunjungi wisatawan. Ada watu jendul di Padukuhan bulu dan Bukit Moyeng yang ada di Padukuhan Sekaro.

Berikutnya, potensi yang ada di Kalurahan Giripurwo adalah Peternakan. Saat ini telah muncul semacam hobi baru beberapa warga di Padukuhan Kebonromo, Bulu Sebagian Sabrang dan Karanganyar, yaitu ternak kambing Peranakan Etawa atau Kambing PE. Selain Kambing PE, ada juga Ayam JOPE (Jowo Super), Sapi, dan Kambing Non PE.

Potensi lainnya adalah potensi Sumber Daya Manusia. Dilihat dari kelompok usia penduduk Kalurahan Giripurwo, ada 4.580 penduduk di kalurahan Giripurwo yang masuk dalam Angkatan kerja. Jumlah yang cukup banyak untuk bisa merubah Giripurwo menjadi lebih maju.

Letak Giripurwo yang merupakan Pintu Gerbang dan Ibu Kota Kapanewon Girimulyo membuat banyak orang berkunjung ke Kalurahan Giripurwo. Potensi kunjungan ke giripurwo dapat dijadikan modal untuk menggali potensi lainnya untuk "dijual" kepada pengunjung Giripurwo.

Sumber daya manusia yang cukup tersedia dengan tingkat pendidikan yang sudah lebih maju dibandingkan waktu sebelumnya. Namun dari tenaga kerja yang ada lebih banyak yang bekerja di luar desa karena kesempatan kerja lebih luas. Adanya berbagai adat istiadat dan kesenian juga merupakan potensi yang dapat mendukung pengembangan desa kedepan karena merupakan wahana kreasi dan kreasifitas masyarakat dalam rangka mendukung pelestarian sosialisasi budaya.

3.2. Masalah

Dari potensi yang ada di desa sebetulnya merupakan kekuatan yang sangat besar dalam pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa masalah dalam pengembangan desa antara lain :

- a. Wilayah sebagian besar berupa perbukitan sehingga sulit untuk dikembangkan untuk usaha perdagangan. Beberapa Padukuhan masih jauh dari pusat prekonomian, sehingga memerlukan waktu bagi mereka untuk menjual hasil pertanian, sehingga mereka memilih untuk dijual di rumah dengan konsekuensi harga yang lebih rendah, dan ditentukan pembeli karena tidak adanya persaingan
- b. Infrastruktur berupa jalan, jembatan dan Drainase masih kurang baik, yang berpengaruh ketidaktancaran transportasi orang dan barang.
- c. Pada musim kemarau kekurangan atau kesulitan air bersih dan pertanian karena sumber air yang ada belum dimanfaatkan dengan maksimal.

- d. Musim hujan sering terjadi tanah longsor yang diakibatkan oleh kurang baiknya sistim pembuangan air berakibat kerugian harta benda, tanaman dan hewan.
- e. Pada musim tertentu sering terjadi wabah suatu penyakit akibat kurangnya sarana prasarana sanitasi lingkungan.
- f. Keterbatasan modal usaha masyarakat sehingga usaha sulit untuk dikembangkan.
- g. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada belum dimanfaatkan sebagian besar produksi desa dijual bahan mentah sehingga harganya murah.
- h. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan desa masih perlu dimaksimalkan demi kelancaran program.
- i. Tenaga kerja banyak yang bekerja diluar desa karena tidak tersedia lapangan kerja.
- j. Lembaga - Lembaga kemasyarakatan yang berjalan kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya.
- k. Banyaknya petani yang kesulitan dalam memperoleh pupuk
- l. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan pariwisata
- m. Kurangnya figure ketokohan dalam masyarakat

Dari permasalahan tersebut pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa yang lain sedikit demi sedikit telah berupaya untuk mengatasinya dengan cara setiap kebijakan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menitikberatkan untuk mengurangi masalah tersebut.

Setiap tahun pemerintah desa berusaha untuk membangun sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan yang pendanaannya berasal dari desa, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pusat dan Swadaya masyarakat, dengan harapan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

BAB IV

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah gambaran yang akan dicapai tentang keadaan masa depan Kalurahan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kalurahan. Visi Kalurahan Giripurwo disusun dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Pemerintah Kalurahan, BPD, LPMD, KKLPM, Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani, PKK, kelompok Perempuan serta semua lembaga organisasi yang ada di Kalurahan. Hal tersebut dimaksud agar semua aspirasi gagasan dan wawasan dapat sebagai masukan dalam rangka penetapan kebijakan untuk menentukan arah dan masa depan Kalurahan guna kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo mempunyai titik berat pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta mental spiritual secara menyeluruh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi Visi Kalurahan Giripurwo adalah : ***"Terwujudnya Masyarakat Kalurahan Giripurwo Yang Aman Sejahtera , dan Agamis Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berkualitas"***.

Dengan pengertian sebagai berikut :

Masyarakat : Sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat dalam suatu system tertentu, tradisi tertentu, konvensi hukum tertentu serta mengarah pada huku kolektif. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat Giripurwo pada umumnya

Aman : bebas dari bahaya, gangguan, terlindung, merasa tenteram dan tidak merasa takut.sutu kondisi yang

bebas dari segala macam bentuk gangguan, hambatan, dan terlindung. Kata aman sendiri mengandung 4 pengertian, yaitu :

- a. Security, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis
- b. Surely, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran
- c. Safety, Perasaan terlindung dari segala bahaya
- d. Peace, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah

Sejahtera : Aman Sentosa, Makmur, terlepas dari segala macam gangguan, tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Agamis : Masyarakat selalu berpegang teguh pada nilai - nilai agama dalam kehidupan sehari - hari.

Pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas :

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi yang akan datang

Dalam 6 (enam) tahun yang akan datang diharapkan akan terwujud *masyarakat Giripurwo yang aman tenteram, tanpa gangguan apapun, terlindung oleh dari bahaya apapun, aman lahir batin sehingga mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya, dengan tetap berpegang teguh pada nilai - nilai agama, menggunakan sumber daya pembangunan dengan tetap mempertimbangan kebutuhan - kebutuhan generasi berikutnya*

Visi ini sejalan dengan Visi Kabupaten Kulon Progo. Dimana Visi Kabupaten Kulon progo adalah "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa"

Visi Kabupaten Kulon progo juga menjadikan masyarakat merasa aman, sejahtera, tenteram sebagai tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Masyarakat Berkarakter dan berbudaya akan terwujud jika masyarakat dalam menjalani

kehidupannya selalu berpegang teguh pada nilai - nilai agama, seperti halnya visi Kalurahan Giripurwo yang agamis.

4.1.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi , yang memuat suatu pernyataan yang akan dilaksanakan oleh Kalurahan agar tercapainya dari pada visi tersebut. Visi dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan sehingga tujuan dapat dicapai. Dalam penyusunan Misi menggunakan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi serta kebutuhan Kalurahan.

Misi Kalurahan Giripurwo adalah :

1. *Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) berdasarkan transparansi, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat*, Good Governance merupakan suatu pengelolaan tata pemerintahan yang baik serta bagaimana cara manajemen pembangunan yang sangat solid dalam artian seluruh aperatur pemerintahh Kalurahan mampu bekerja sama dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi dan kesalahan administratif. Mengapa harus Good Governance? Dengan Good Governance akan ada kesederhanaan dalam pelayanan birokrasi agar tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, memiliki kejelasan tentang persyaratan dan pembayaran yang akan dikenakan dalam pelayanan birokrasi, serta menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu yang ditentukan tanpa mempersulit masyarakat. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan birokrasi dalam arti pemerintah tidak berada diatas dan masyarakat tidak berada dibawah pemerintah. Masyarakat merasa aman ketika semua kepentingannya terlayani dan terlindungi oleh Pemerintah Giripurwo

2. ***Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penecanaan dan pelaksanaan pembangunan kalurahan*** Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan akan berjalan dengan baik apabila tidak melupakan masyarakatnya. Parsitisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kalurahan Giripurwo selalu berupaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam setia proses penyelenggaraan pemerintahan KAluran, Pelaksanaan pembanguna, Pembinaan Ke,asyarakatan, maupun dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang aman dan sejahtera akan terwujud jika Good Governance dilaksanakan
3. ***Memantapkan dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat*** Kesehatan adalah modal dasar dalam pembangunan masyarakat yang memiliki kesehatan yang baik, fisik maupun mental dapat melakukan aktivitasnya secara produktif sehingga dapat mengabdikan diri untuk membangun Giripurwo. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung kesehatan prima dapat menciptakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan terobosan baru dan pemikiran baru tentang pembangunan terutama dalam peningkatan pertumbuhan dibidang ekonomi sosial dan budaya. Penduduk yang sehat akan berpikiran maju dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk selalu menginginkan perubahan dari kondisi ia sekarang ini. Masyarakat sejahtera akan terwujud apabila derajat Kesehatan warganya tinggi
4. ***Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya local*** Sarana Prasarana dan Infrastruktur di wilayah Giripurwo saat ini masih sangatlah

kurang. Jalan - jalan menuju akses ekonomi warga ada beberapa masih berupa batuan, licin dengan tebing dan jurang di kanan kiri. Tersedianya infrastruktur yang memadai dapat membantu mensejahterakan warga. Sebagian besar warga Giripurwo adalah Petani Pekebun. Tersedianya sarana prasarana transportasi dapat membantu warga dalam penjualan hasil kebunnya. Dengan demikian akan ada kegiatan ekonomi guna peningkatan pendapatan warga. Kesejahteraan warga akan meningkat seiring dengan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kalurahan. Mengapa harus dengan sumber daya local? Giripurwo merupakan wilayah dilemang perbukitan menorah. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas lereng dan tebing. Dibalik topografi yang perbukitan, giripurwo menyimpan sumber daya pembangunan yang beragam. Batu kali, kayu, bambu, serta sumber daya manusia yang tak kalah dari wilayah lain. Penggunaan sumber daya local akan meningkatkan penghasilan dan daya saing dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga kemakmuran akan diraih Bersama - sama

5. *Menciptakan Kemakmuran dengan Pengembangan BUMDESA*, untuk menjalankan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Masyarakat Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat tentunya diperlukan pendanaan. Selama ini sumber - sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Kalurahan hanya mengandalkan dana transfer baik dari pusat maupun daerah. Ketika dana transfer dari pusat dan daerah semakin kecil otomatis kalurahan menjadi terbatas geraknya. Padahal Pemerintah Kalurahan Dituntut untuk bisa melaksanakan tanggungjawabnya kepada warga masyarakat kalurahan. Oleh karenanya diperlukan adanya sumber dana lain yang dapat menopang kekurangan dari dana transfer. Memaksimalkan Pendapatan Asli Kalurahan adalah Langkah wajib yang harus

ditempuh. Dikalurahan Giripurwo telah berdir BUMDESA sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan. Dengan Pengembangan BUMDESA diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan dalam rangka pemenuhan tanggungjawab Pemerintah Kalurahan Giripurwo kepada warganya, sehingga warga merasa terlayani, aman dan tenteram

6. *Melestarikan dan mengembangkan nilai tradisi dan budaya Giripurwo.* Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, dan diwariskan turun temurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat, pakaian, dan karya seni. Kalurahan Giripurwo memiliki banyak tradisi dan budaya yang wajib untuk dilestarikan. Budaya dan tradisi dapat dijadikan jembatan untuk menginfiltasi nilai – nilai baru pembangunan. Budaya dan tradisi juga merupakan modal pembangunan.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Misi 1, yaitu *Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) berdasarkan transparansi, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat*, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2027 adalah

Tujuan dan sasarannya adalah :

- i. Meningkatkan pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis online
 - b. Terwujudnya pelayanan public yang cepat dan tepat dan mudah

2. Peningkatan Operasional Pemerintah Desa.
 - a. Optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat
 - b. Terpenuhinya sarana prasana pelayanan kepada masyarakat
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.
 - a. Meningkatnya kinerja pelayanan pamong kepada masyarakat
 - b. Meningkatnya budaya disiplin
4. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Pemerintah Desa secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh Publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kelurahan
 - b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan kalarahan

Misi 2 yaitu, *Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata, dan mendukung perekonomian masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya local*, tujuan yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana Transportai;
 - b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas;
 - c. Meingkatkan Ketersediaan sarana prasarana perdagangan
 - d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan pariwisata
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa, dengan sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa.
 - b. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung terwujudnya generasi cerdas dan bertaqwa, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan.
 - b. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Misi 3, yaitu *Meningkatnya taraf dan kualitas kesehatan masyarakat*. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, dengan sasaran
 - a. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada balita/ stunting
 - b. Meningkatnya usia harapan hidup
2. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat, dengan sasaran
 - a. Meningkatnya kedisiplinan warga dalam menjaga Kesehatan
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan

Misi 4, *Memfasilitasi partisipasi dan akses masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan kepada perempuan*, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah

1. Terwujudnya Pembangunan yang dilandasi prinsip transparan, akuntabel dan berkeadilan dengan sasaran

- a Terwujudnya pembangunan yang merata sesuai harapan masyarakat
- 2 Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dengan mengedepankan musyawarah mufakat dengan sasaran
 - a Terwujudnya masyarakat yang proaktif dalam segala jenis kegiatan pembangunan

Misi 5 yaitu, : *Menciptakan kemakmuran masyarakat dengan mengembangkan BUMDESA* , Tujuan dan sasarannya adalah :

- 1 Mengembangkan BUMDESA menjadi sara penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran
 - a Terwujudnya masyarakat Giripurwo yang sejahtera
- 2 Meningkatnya sumber - sumber pendapatan asli desa dengan sasaran
 - a Meningkatnya pendapatan asli kalurahan sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
- 3 Penyediaan ruang dan Prasarana Pengembangan ekonomi Kalurahan dengan sasaran
 - a Peningkatan Usaha BUMDES, dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintahan Kalurahan
 - b Peningkatan Kompetensi UMKM di Kalurahan

Misi 6, yaitu *melestarikan dan mengembangkan nilai - nilai tradisi, budaya dan kesenian Giripurwo*, Tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

- 1 Terwujudnya masyarakat Giripurwo yang berbudaya dengan sasaran
 - a Mengembangkan nilai - nilai keharmonisan dan pola asah, asih asuh dalam kehidupan masyarakat
 - b Pelestarian seni dan budaya
 - c Mengembangkan dan lestarikan budaya gotong royong

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pencapaian pembangunan masyarakat desa secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Giripurwo perlu merumuskan beberapa strategi untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditungkan dalam RPJM ini. Adapun strategi tersebut adalah:

1. Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Peningkatan kinerja aparat pemerintahan desa merupakan strategi yang sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini diujutkan dalam bentuk perbaikan struktural kelembagaan yang ada di desa, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan merespon/menjabatani kepentingan warga dalam pelayanan dengan efisien dan transparan.

2. Meningkatkan kerja sama antar Institusi yang ada di desa

Peningkatan kerjasama dengan mitra kerja yang ada di desa merupakan strategi yang mampu memberikan jaminan terhadap keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan desa. Kerjasama dalam penetapan kebijakan dan penjangkaran aspirasi yang melibatkan kelembagaan yang ada di desa.

3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Optimalisasi Pembangunan di Segala Bidang.

Strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimahisasi pembangunan di berbagai bidang akan dilaktukan dengan cara dua arah, yaitu pemberdayaan masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik dan menjalin kerja sama dengan pihak lain/luar dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Menjaring dan Mendengarkan Aspirasi Masyarakat dari Tingkat Terbawah/Terkecil mengenai Cara Mencapai Visi dan Misi Desa.

Pelaksanaan pembangunan yang partisipatif merupakan upaya untuk menciptakan iklim pembangunan desa yang lebih prima dan tepat

sasaran. Terdapat tiga arah yang akan dilakukan dalam strategi ini antara lain : optimalisasi dan pemberian dukungan penuh dari desa dalam rangka pembangunan di Pedukuhan, reorganisasi dan regenerasi pengurus kelembagaan yang ada di desa dan pedukuhan dan melibatkan kader-kader potensial/ generasi muda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Lebih rinci mengenai strategi pembanguana kalurahan Giripurwo adalah sebagai berikut :

Misi 1, yaitu *Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) berdasarkan transparansi, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,*

Strategi :

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pamong Kalurahan dan etos kerja birokrasi
- Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat
- Meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

Arah kebijakan :

- Meningkatkan kualitas sdm pamong sesuai kompetensi yang dibutuhkan
- Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
- Meningkatkan kualitas pelayanan public diberbagai bidang
- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

Misi 2 yaitu, *Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan mendukung perekonomian masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya local*

Strategi :

- Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pendukung pertanian
- Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pendukung perekonomian masyarakat
- Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pendidikan
- meningkatkan pembangunan sarana prasarana di bidang pemerintahan

Arah kebijakan :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana prasarana pertanian
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Kesehatan
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penyelenggara pemerintahan kalurahan

Misi 3, yaitu *Meningkatnya taraf dan kualitas kesehatan masyarakat,*

Strategi :

- Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan bagi keluarga miskin
- Meningkatkan usaha proposi Kesehatan dan pencegahan penyakit
- Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat

Arah kebijakan :

- Meningkatkan upaya pelayanan Kesehatan bagi warga masyarakat
- Meningkatkan standar pelayanan bidang kesehatan

Misi 4. *Memfasilitasi partisipasi dan akses masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan kepada perempuan,*

Strategi :

- Melakukan perencanaan berdasarkan musyawarah mufakat
- Melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan

Arah kebijakan

- Penyelenggaraan musdus, musdes
- Melaksanakan pembangunan di segala bidang

Misi 5 yaitu *Menciptakan kemakmuran dengan mengembangkan BUMDESA*

Strategi :

- Melaksanakan perencanaan kalurahan pada sector ekonomi mikro
- Memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil ekonomi warga
- Memberikan kemudahan dalam permodalan

Arah kebijakan

- Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang BUMDesa
- Pembuatan pasar/kios kalurahan

Misi 6, yaitu *melestarikan dan mengembangkan nilai – nilai tradisi, budaya dan kesenian Giripuruwo,*

Strategi :

- Pembinaan pola pengasuhan/parenting
- Pembinaan seni dan budaya
- Pembinaan semangat kegotongroyongan

Arah Kebijakan

- Pelatihan Parenting
- Pembinaan Keagamaan

- Pembinaan Seni dan Budaya
- Pelaksanaan Gorong Royong masyarakat

Tabel 12

Visi,Misi,Tujuan Sasaran dan Strategi

Visi : <i>"Terwujudnya Masyarakat Kalurahan Giripurwo Yang Aman Sejahtera , dan Agamis Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berkualitas"</i> .		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : <i>Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) berdasarkan transparansi, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat</i>		
Meningkatkan pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis online	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pamong Kalurahan dan etos kerja birokrasi
		Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat
		Meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
	Terwujudnya pelayanan public yang cepat dan tepat dan mudah	
Peningkatan Operasional Pemerintah Desa	Optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sumber - sumber pedapatan untuk Operasional Pemerintah Kalurahan
	Terpenuhinya sarana prasana pelayanan kepada masyarakat	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kinerja pelayanan Pamong	Pengembangan budaya 3 S (Senyum , Salam dan Sapa)
	Meningkatnya Budaya Disiplin	Pengembangan Budaya Disiplin Kepada Pamong
Pengembangan sistem pelaporan kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas	Pelatihan untuk Pamong

Pemerintah Desa secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh Publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintah Kelurahan	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi Pamong
<i>Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan mendukung perekonomian dengan pemanfaatan sumberdaya lokal</i>		
Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana perekonomian Kelurahan	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi	Peningkatan dan pembangunan sarana prasana pendukung transportasi
	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian	Peningkatan dan pembangunan sarana prasana pendukung Pertanian
	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Peningkatan dan pembangunan sarana prasana pendukung Perdagangan
	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana wisata	Peningkatan dan pembangunan sarana prasana pendukung wisata
Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana perekonomian Kelurahan	Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Kesehatan di Kelurahan	Pembinaan Kesehatan untuk masyarakat
	Peningkatan ketersediaan alat - alat pelatanaan Kesehatan di Kelurahan	Pengembangan Pos pelayanan Kesehatan Kelurahan
Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan Kelurahan untuk mendukung	Meningkatnya ketersediaan pusat - pusat pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana prasarana Pendidikan di Kelurahan

terwujudnya generasi cerdas dan bertaqwa		
	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan Pendidikan di Kelurahan
Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan Kelurahan	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
<i>Misi 3 : Meningkatkan Taraf dan Kualitas Kesehatan Masyarakat</i>		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Penurunan Prevalensi kekurangan gizi pada balita / stunting	Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan bagi keluarga miskin
	Meningkatnya usia harapan hidup	Peningkatan promosi kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Meningkatnya kedisiplinan warga dalam menjaga Kesehatan	Peningkatan promosi kesehatan
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan	Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelatihan bidang kesehatan
<i>Misi 4 : Memfasilitasi partisipasi dan akses masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan kaum perempuan</i>		
Terwujudnya pembangunan yang dilandasi prinsip transparan, akuntabel dan berkeadilan	Terwujudnya pembangunan yang merata sesuai harapan masyarakat	Melakukan perencanaan berdasarkan musyawarah mufakat
		Melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan
Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan mengedepankan musyawarah mufakat	Terwujudnya masyarakat yang proaktif dalam segala jenis kegiatan pembangunan	Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan
<i>Misi 5 : Menciptakan kemakmuran masyarakat dengan mengembangkan BUMDESA</i>		
Mewujudkan masyarakat yang	Terwujudnya masyarakat Giripurwo	Melakukan perencanaan pada sector ekonomi mikro

sejahtera	yang sejahtera	
Mengembangkan BUMDESA menjadi sarana penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya BUMDESA yang kuat dan mandiri sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan usaha - usaha bumdesa
	Peningkatan Pendapatan Asli Kelurahan	
Penyediaan ruang dan prasarana pengembangan ekonomi kaurahan	Terwujudnya masyarakat Giripurwo yang sejahtera	Penyediaan sarana prasarana untuk mempermudah pemasaran hasil ekonomi warga/masyarakat
		Peningkatan Kompetensi UMKM di Giripurwo
<i>Misi 6 : Melestarikan dan mengembangkan Nilai - nilai Tradisi, budaya dan keseman di Giripurwo</i>		
Terwujudnya Masyarakat Giripurwo yang berbudaya	Mengembangkan Nilai - nilai Keherminisan dan pola asah, asih, asuh dalam kehidupan masyarakat	Pembinaan pola pengesuhan/parenting
	Pelestarian Seni dan Budaya	Pembinaan seni dan budaya
	Pengembangan dan Pelestarian Budaya Gotong Royong	Pembinaan semangat kegotongroyongan

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa, dengan dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan dari dana yang diterima oleh desa dapat dipergunakan untuk pendanaan kepentingan masyarakat.

6.1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Giripurwo terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa terdiri atas :
 - 1) hasil usaha;
 - 2) hasil aset;
 - 3) swadaya dan partisipasi;
 - 4) gotong royong; dan
 - 5) lain-lain pendapatan asli desa.
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Dana Bagi Hasil yang terdiri atas :
 - 1) Pajak Daerah; dan
 - 2) Retribusi Daerah;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
- e. Bantuan keuangan dari :
 - 1) APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - 2) APBD Kabupaten Kulon Progo
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kalurahan Giripurwo tentunya dibutuhkan biaya untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dirancang. Untuk membiayai seluruh kegiatan Pemerintah Kalurahan Giripurwo akan mengoptimalkan pendapatan, Pemerintah Kalurahan Giripurwo akan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Penguatan

BUMDes adalah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, selain itu akan diusahakan pula peningkatan kualitas bangunan, baik Kios Desa maupun Pendopo sehingga menjadi layak untuk disewa. Tidak ketinggalan adalah Revitalisasi Lapangan Balai Desa Giripurwo. Begitu juga Waduk Mini Kleco akan dikelola sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa yang maksimal. Untuk meraih dana transfer, Pemerintah Kalurahan akan berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk menggunakan dana sebaik – baik ya dengan bertanggungjawab, sehingga dana tersebut akan selalu dapat diraih dengan peningkatan jumlah setiap tahunnya.

6.2. Belanja Desa

Belanja desa akan dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas – prioritas desa, hal – hal yang penting dan prioritas dibiayai dengan menggunakan sumber dana yang pasti, seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Kegiatan Fisik dan Pemberdayaan sepenuhnya akan dibiayai oleh Dana Desa. Dana desa akan dipergunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Intinya penggunaan dana Desa adalah sesuai peraturan yang ada.

Selanjutnya, Alokasi dana desa akan dipergunakan untuk membiayai Penghasilan tetap Pamong, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan Beserta BPK, agar tujuan pencapaian misi good goverment tercapai.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diplotkan pada kegiatan – kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan sewa lelang Tanah Kas kalurahan dan kegiatan – kegiatan lain yang dilaksanakan pada triwulan ke 4. Pendapatan Asli desa akan digunakan untuk kegiatan – kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Semua Belanja dilaksanakan dengan cara non tunai.

6.3 Pembiayaan Kalurahan

Setiap rencana kegiatan kalurahan disusun berdasarkan usulan dan aturan yang berlaku. Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan. Tidak semua yang dianggarkan habis sesuai dengan rencana yang disusun. Perubahan rencana dimungkinkan dilaksanakan apabila ada perubahan anggaran pada tahun yang berjalan. Setiap belanja yang dilaksanakan sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran, sehingga menyisakan sisa belanja.

Sisa lebih penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan - kegiatan tahun berikutnya sesuai dengan peruntukan. Sisa dana desa digunakan untuk kegiatan yang menjadi prioritas dana desa.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Suatu perencanaan yang baik adalah yang bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan tepat sasaran. Namun demikian suatu hal yang sangat tidak kita inginkan sering kita jumpai yakni tanpa direncanakan namun harus terpaksa kita laksanakan, karena demi perintah dari pemerintah yang lebih atas. Sehingga hal-hal seperti inilah memerlukan kebijakan dan yang namanya kebijakan biasanya tidak sesuai dengan perencanaan. Sebatas kebijakan tersebut memenuhi hajat hidup orang banyak dan tidak melanggar ketentuan, maka kebijakan tersebut sah-sah saja dan dapat dilaksanakan.

Arah kebijakan umum pembangunan yang mengandung arti penjabaran dan realisasi dari visi dan misi pembangunan dalam jangka waktu tertentu (6 tahun) dan harus memperhatikan beberapa hal :

1. Permasalahan yang mendesak.
2. Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil masyarakat.
3. Kemampuan pendanaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta lembaga yang ada.

Kebijakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Kalurahan berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 tahun 2019 , bahwa Pemerintah Kalurahan Giripurwo melaksanakan beberapa kewenangan antara lain:

1. Pengelolaan tugas pembantuan
2. Pemantauan bentuk dan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan
3. Pencalonan dan Pemilihan serta penetapan Lurah
4. Pembentukan dan Pembentukan Lembaga Kalurahan
5. Penyusunan dan penetapan APBDal termasuk perhitungannya
6. Penetapan Peraturan Kalurahan
7. Pembinaan Rencana Pembangunan Kalurahan secara partisipatif
8. Penetapan kekayaan Kalurahan

Penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk lebih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan tidak

memandang waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan apa yang menjadi kebutuhan dapat terpenuhi dengan memuaskan. Setiap kebijakan yang diambil ditetapkan Pemerintah Desa selalu dikonsultasikan dengan EPD dan lembaga lain yang berkaitan dengan harapan kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Arah kebijakan pembangunan Desa Giripurwo lebih mengutamakan pembangunan yang menjadi usulan dari masyarakat dengan mengutamakan pembangunan yang sangat mendesak dan berpengaruh terhadap perubahan disegala bidang menuju yang lebih baik.

Kebijakan diusahakan selalu berpihak pada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dan penolakan dari masyarakat hal ini ditempuh dengan mensosialisasikan terlebih dahulu setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dalam kegiatan pembangunan desa dengan dukungan swadaya yang berupa dana, tenaga, dan lainya dengan harapan masyarakat merasa handarbeni sehingga mau dan mampu memelihara serta melestarikannya.

Pemerintah desa menagambil kebijakan dalam rangka untuk memelihara dan melestarikan hasil-hasil pembangunan, masyarakat

dihimbau untuk melakukan pemeliharaan secara berkala/ setiap tiga bulan sekali melakukan kegiatan.

Tahun pertama kebijakan yang akan dilaksanakan adalah yang menyangkut internal Pamong Kalurahan. Dalam rangka mencapai visi masyarakat yang aman, dilaksanakan dengan menciptakan good government. Yang akan dibenahi pertama adalah Pamong Kalurahan. Peningkatan kompetensi pamong akan dilaksanakan pada tahun - tahun awal. Pelatihan untuk pamong, pengiriman peserta Bimbingan teknis pamong serta kegiatan lain yang bermuara pada peningkatan kapabilitas pamong akan dilaksanakan. Begitu juga dengan perencanaan pembangunan untuk masa enam tahun, diawali dengan musdus yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat. Kaya - miskin, laki - laki dan perempuan, tua muda semua ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan. Tentunya, tidak ketinggalan kegiatan belanja rutin seperti belanja Penghasilan tetap, operasional Pemerintahan, dan tunjang bpk yang dilaksanakan setiap bulan pada setiap tahunnya.

Pada tahun kedua kegiatan - kegiatan pembinaan untuk pamong tetap dilaksanakan. Begitu juga dengan kegiatan pembinaan untuk warga masyarakat, seperti pembinaan Lembaga - Lembaga kemasyarakatan, pembinaan keagamaan akan dilaksanakan di awal tahun. Sehingga misi terwujudnya masyarakat yang agamis akan tercapai. Untuk mencapai visi

masyarakat sejahtera, akan dilaksanakan pelatihan – pelatihan untuk kelompok – kelompok masyarakat. Pelatihan perikanan, pertanian, perdagangan dll. Kegiatan – kegiatan lain tetap dilaksanakan sesuai dengan prioritas.

Tahun ke tiga dilaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada Rencana pembangunan menengah Kalurahan Tahun ke 3. Kegiatan – kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan akan disampaikan ke supra desa, seperti dana desa, TMMD, atau CSR dari berbagai perusahaan. Tentunya sesuai dengan kewenangan kalurahan yang ada.

Berikutnya tahun ke 4 dan ke 5, juga dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan perubahan kegiatan, mengingat dinamisasi peraturan yang ada yang mengatur kalurahan. Selain itu perubahan dimungkinkan karena kegiatan yang telah diusulkan telah dilaksanakan oleh pihak lain atau bahkan swadaya masyarakat. Pada intinya semua kegiatan dilaksanakan berdasarkan proses perencanaan yang melibatkan seluruh warga masyarakat, pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat, dan oleh semua masyarakat.

Selanjutnya di tahun ke 6, diharapkan semua kegiatan yang menjadi usulan dapat terlaksana, minimal 70%, selanjutnya sebagai akhir dari rencana pembangunannya jangka menengah kalurahan, apada tahun ke 6 juga akan dilaksanakan evaluasi akhir terhadap proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama 6 tahun.

Kegiatan – kegiatan pembangunan kalurahan yang dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kulon Progo, yaitu terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang aman, berkeadilan, dan sejahtera lahir dan batin

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkesinambungan merupakan hal yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Berangkat dari kalimat tersebut maka agar tidak hanya sebagai slogan belaka perlu adanya strategi pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya strategi pembangunan Kalurahan diharapkan dapat mengimplementasikan program Lurah, serta sebagai payung roda perumusan program kegiatan pembangunan.

Adapun strategi pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan adalah :

1. Pelaksanakan pembangunan dimulai dari tingkat Pedukuhan, hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan keuangan kepada masing-masing Pedukuhan yang dari tahun ke tahun ada kecenderungan peningkatan, karena manfaatnya sangat besar dirasakan oleh masyarakat.
2. Untuk tingkat Pedukuhan yang dimotori oleh Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (KK-LPMK) melalui mekanisme Musyawarah Pedukuhan (MUSDUK) mengajukan usulan untuk dibawa ke MUSRENBANGKAL. Selain mengajukan usulan untuk di bawa ke tingkat Kalurahan, namun masing-masing Pedukuhan sudah mendapatkan alokasi dana untuk stimulan pembangunan.
3. Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan merupakan forum untuk merencanakan pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan bersama LPMD. Hasil dari pelaksanaan MUSRENBANGKAL dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kal).
4. Karena adanya pertimbangan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta memenuhi hajat hidup masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Desa Giripurwo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa maka Program Pembangunan Desa disesuaikan sesuai dengan pembagian yang ada Program Pembangunan Desa dibagi menjadi 4 (empat) bidang, meliputi :

1. **Penyelenggaraan Pemerintahan**
 - 1) Penghasilan Tetap Lurah dan Perangkat Kalurahan
 - 2) Tunjangan Suami / Istri
 - 3) Tunjangan Anak

- 4) Tunjangan Kesehatan
 - 5) Tunjangan BPK
 - 6) Honorarium Bendahara Kalurahan
 - 7) Honor Pesuruh Kalurahan
 - 8) Honorarium Tenaga Honorer Kalurahan
 - 9) Kegiatan Operasional Perkantoran
 - 10) Operasional BPK
 - 11) Operasional Padukuhan
 - 12) Operasional Rukun Warga
 - 13) Operasional Rukun Tetangga
 - 14) Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Prasarana Kantor
 - 15) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
 - 16) Penyelenggaraan Musyawarah Pedukuhan
 - 17) Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan
 - 18) Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan
 - 19) Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
 - 20) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kalurahan
 - 21) Pendataan, Penyusunan dan Pemutakhiran Monografi / Profil Kalurahan
 - 22) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset Kalurahan
 - 23) Penyusunan Kebijakan Kalurahan
 - 24) Penyusunan Laporan Lurah, LPPK, dan IPPK
 - 25) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilur, penyaringan dan penjaringan
 - 26) Sertifikasi tanah kas kalurahan
 - 27) Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah kalurahan
- 2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TPA/TK/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, operasional, dst)
 - 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Gedung PAUD
 - 4) Pengelolaan perpustakaan milik kalurahan
 - 5) Penyelenggaraan Posyandu
 - 6) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
 - 7) Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan
 - 8) Pengadaan APE Posyandu
 - 9) Pembangunan/Rehabilitasi Perkerasan dan Corblok Jalan Lingkungan Kalurahan

- 10) Pembangunan / Rehabilitasi Perkerasan dan Corblok Jalan Usaha Tani
- 11) Pembangunan/ Rehabilitasi Gorong-gorong, Drainase, Cyclops, Pengadaan Pintu Air, Talud dan saluran air lainnya
- 12) Pembangunan/Rehabilitasi bangunan situs milik Kalurahan
- 13) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK
- 14) Bantuan fasilitas jamban untuk Masyarakat miskin
- 15) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah kalurahan/permukiman
- 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga
- 17) Penyelenggaraan informasi publik kalurahan

3. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

- 1) Pembuatan / Pembangunan Pos Ronda
- 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga kemandirian/ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
- 3) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat kalurahan
- 4) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil kalurahan di tingkat Kabupaten
- 5) Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dan lain-lain)
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan
- 7) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- 8) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- 9) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- 10) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga
- 11) Pembinaan LKMD/LPM/LPMK
- 12) Pembinaan PKK
- 13) Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung dan lain-lain)

- 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain)
- 3) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 5) Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
- 6) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kalurahan/Kios milik Kalurahan

5. Bidang Tak Terduga

- 1) Penanggulangan Bencana
- 2) Keadaan Darurat
- 3) Keadaan Mendesak

BAB IX

PENUTUP

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo ini disusun.

RPJM merupakan dokumen utama dalam perencanaan pembangunan Kalurahan. Dengan adanya dokumen perencanaan yang berkualitas pelaksanaan pembangunan akan terarah, sehingga pencapaian Visi Misi lurah menjadi Lebih mudah. Muara akhir nya adalah terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana apa yang menjadi Visi Lurah Terpilih Kalurahan Giripurwo Periode 2021 - 2027

Selanjutnya pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kalurahan Giripurwo akan senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mewadai partisipasi warga dalam perencanaan Pembangunan, mengedepankan kerjasama dan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan.

Dikemudian hari apabila terdapat perubahan terhadap peraturan, situasi keadaan kalurahan dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, RPJM ini dapat dilakukan perubahan, sepanjang t ada persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan

Rencana Program Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini masih banyak kesalahan dan kekurangan untuk itu kami mohon maaf dan selanjutnya mohon saran dan kritik yang baik agar kami dapat menyusun lebih baik dan mendekati sempurna, terima kasih.

Giripurwo, Februari 2022

Lurah Giripurwo

MARDI SANTOSA

BAB IX

PENUTUP

Akhirnya dengan berbagai kendala yang kita hadapi, namun karena dilandasi untuk terus bersungguh-sungguh dalam mengemban tugas dan menjalankan amanah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) GIRIPURWO Tahun 2021 - 2027 dapat terselesaikan.

Semua program yang kami cantumkan adalah kebutuhan utama yang kami susun dengan melihat kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Kalurahan. Karena program ini hanya untuk 6 tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan Lurah, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti. Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusunan dan perencanan.

Namun demikian kami yakin bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ini masih jauh dari sempurna, sehingga perlu adanya penyempurnaan di masa mendatang.

Dengan demikian diharapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan terutama dalam pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kalurahan) dalam setiap tahunnya.

Giripurwo, 28 Februari 2022

Lurah Giripurwo

TTD

MARDI SANTOSA